

KAJIAN TEORI TURNER: PRIORITAS KEBUTUHAN PERMUKIMAN DAN TINGKAT PENDAPATAN

Studi Kasus: Permukiman Bajo, Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

M. Amir Salipu^{1*}, Anggia R. Nurmaningtyas¹, Inayatul Ilah Nashruddin¹

¹Staf Pengajar Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

*e-mail penulis korespondensi: asalipu@gmail.com.

ABSTRAK

Permukiman adalah sekumpulan rumah yang mencakup aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik yaitu: lokasi, lingkungan dan sarana prasarana, sedangkan aspek non fisik yaitu: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Turner, perumahan bukan kata benda tetapi kata kerja tentang proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial-ekonomi penghuninya. Perubahan pola lokasi perumahan pada golongan tertentu merupakan konsepsi segregasi (pemisahan) tingkat sosial yang dapat diukur pada perubahan lokasi. Hal ini terutama dilakukan oleh penduduk yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi, yang memilih lokasi rumah dengan standar modern dan memberikan identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Teori Turner tentang prioritas kebutuhan perumahan terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat di kawasan permukiman Suku Bajo di Pantai Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Teori Turner tentang prioritas kebutuhan perumahan yaitu bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang mana lokasi di sekitar tempat pekerjaan sangat penting, namun bagi Suku Bajo di Pantai Bajoe walaupun *level income* mereka sudah berubah dari sangat rendah menjadi rendah dan rendah-menengah, lokasi permukiman mereka tetap diprioritaskan dekat dengan tempat kerja. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari budaya Suku Bajo yang dikenal dengan manusia bahari. Teori Turner lebih cocok diterapkan pada masyarakat di perkotaan padat dengan harga lahan yang mahal serta kondisi masyarakat yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. .

Kata kunci : *Teori Turner, Permukiman Pesisir, Suku Bajo, Pantai Bajoe, Kabupaten Bone*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman nelayan tersebar di sepanjang pulau-pulau di seluruh Indonesia. Ada yang terletak jauh terpencil dari keramaian, ada pula yang terletak di tepi pantai, muara sungai, teluk dan kawasan tambak, meskipun ini tidak berarti bahwa tambak-tambak tersebut merupakan milik dari nelayan tadi. Suku Bajo mendiami daerah pesisir Pantai Bajoe. Sebagian besar masyarakat Suku Bajo memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang menghadapi banyak tantangan, baik di darat maupun di laut.

Menurut Juhana (2000) dalam Nurmaningtyas (2012:34), pada umumnya masyarakat di daerah pantai merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial

ekonomi yang rendah. Pendidikan formal dan keterampilan secara umum juga rendah. Sarana sosial seperti pendidikan dan sarana perhubungan serta komunikasi umumnya sangat kurang. Di samping itu, faktor fisik seperti karakteristik wilayah pesisir ini dibentuk oleh parameter lingkungan fisik seperti pasang surut, arus laut, gelombang, angin, salinitas, suhu dan perubahan muka air laut. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir mengalami banyak tantangan yang berpengaruh terhadap keamanan lingkungan masyarakat pesisir yang berdiam di atas perairan.

Suku Bajo sebagai suku laut, dijelaskan Nimmo dalam Salipu (2000:l-1) sebagai berikut:

"Suku Bajo atau Bajau dikenal sebagai salah satu suku Nomads yang masih

bertahan sampai saat ini. Di Filipina, suku Bajau merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di perahu (Boat-dwelling) masih mengembara di laut Sulu, Filipina Selatan”.

Di permukiman Suku Bajo, Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi kontak antara Suku Bajo dengan Suku Bugis di sekitar Teluk Bone. Menurut Salipu (2000:I-1), kontak antara kedua suku ini menyebabkan akulturasi budaya dari budaya pendatang (Bajo) dengan budaya lokal (Bugis), yaitu berubahnya budaya Suku Bajo yang dapat dilihat dari perubahan tempat tinggal dari *babaroh* ke *papondok* lalu *rumak* (rumah panggung) di atas laut dan saat ini sebagian besar rumah mereka menjadi rumah panggung di atas daratan. Perubahan bentuk tempat tinggal seperti dikemukakan di atas diakibatkan oleh adanya perubahan budaya pada Suku Bajo, yang dipengaruhi oleh budaya Bugis, sebagaimana yang dijelaskan Lauer dalam Salipu (2000:I-2):

“Akulturasi adalah satu pola perubahan di mana terdapat tingkat penyatuan antara dua kebudayaan. Penyatuan itu dapat menimbulkan perubahan dalam kebudayaan atau terutama dalam salah satu di antara kedua kebudayaan itu. Penyatuan di sini tidak berarti bahwa kesamaannya lebih banyak daripada perbedaannya, tetapi hanya bahwa kedua kebudayaan menjadi semakin serupa dibanding keadaan sebelum terjadinya kontak antara keduanya”. Namun perubahan yang terjadi tidak menghilangkan semua ciri budaya Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, ada bagian-bagian tertentu yang masih dipertahankan, misalnya kepercayaan terhadap penguasa di laut dan di darat yang perlu dihormati.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Teori Turner mengenai prioritas kebutuhan perumahan terkait dengan tingkat pendapatan dalam buku *Freedom to Build* pada permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, apakah terdapat kesamaan, perbedaan atau pengembangan dari teori tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh implementasi Teori Turner mengenai prioritas kebutuhan perumahan terkait dengan tingkat pendapatan dalam buku *Freedom to Build* pada permukiman Suku Bajo di Bajoe Kabupaten

Bone Sulawesi Selatan, apakah terdapat kesamaan, perbedaan atau pengembangan mengenai teori tersebut.

II. KAJIAN TEORITIS

Proses Bermukim Suku Bajo di Bajoe

Kampoh Bajo merupakan bagian dari Kelurahan Bajoe yang terletak sekitar 6 km dari Watampone ibukota Kabupaten Bone. Pada mulanya daerah ini tidak berpenduduk, baru ketika orang Bajo pertama kali datang di daerah Bone, mereka membuat *Kampoh* di sekitar perbatasan daerah Cellu yang pada waktu itu masih merupakan pantai. *Kampoh* ini ditandai dengan adanya patok yang mereka sebut *sambuah* yang dipancangkan dengan sebutan *sambungan taguk pulih* yang artinya patok tetap atau patok mati yang tidak dapat dicabut lagi. *Kampoh* ini tidak mempunyai rumah karena pada waktu itu orang Bajo belum mengenal rumah, mereka tinggal bersama keluarganya dalam perahu yang juga digunakan sebagai rumah.

Kampoh ini dipimpin oleh seorang kepala suku yang mereka sebut *Atowe Kampoh* dan dibantu oleh pelaksana tugas yang mereka sebut *Sariah*. Segala urusan keagamaan dipimpin oleh seorang imam yang mereka sebut *Guru Same*. Pada mulanya *Guru Same* ini berasal dari lapisan *Lolo Same*, semua anggota *kampoh* disebut *anak parenta*.

Menurut Syahbandi (1996) dalam Salipu (2000:II-16), ada 5 lapisan masyarakat yang dikenal oleh Suku Bajo, yaitu:

1. *Lolo Same*, atau bangsawan Bajo;
2. *Ponggawa Same*, golongan bangsawan akan tetapi sudah mempunyai percampuran darah dengan strata di bawah atau adanya perkawinan campuran dengan suku lainnya;
3. *Gallarang*, yaitu golongan bangsawan yang mempunyai banyak campuran darah dengan strata di bawahnya;
4. *Same*, artinya orang biasa;
5. *Ate*, atau hamba sahaya.

Khusus mengenai lapisan *ate* (budak) ini diungkapkan oleh Mattulada dalam karyanya bertajuk *Latoa* (1995), bahwa terjadinya strata hamba ini karena adanya peristiwa jual beli atau kalah dalam perang, perampasan perang dan karena adanya putusan pengadilan.

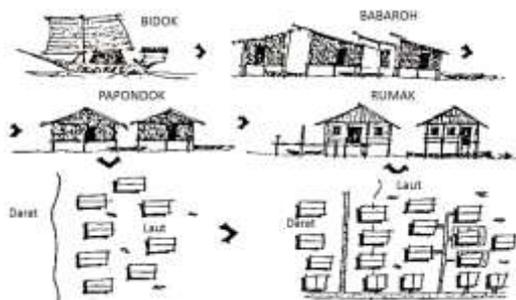
Permukiman Suku Bajo di Bajoe

Menurut Soesangobeng (1977), sebelum Suku Bajo membangun rumah di Bajoe, maka mereka bertempat tinggal di *bidok* (perahu) sampai tahun 1935. Setelah itu mereka mulai membangun rumah di tepi pantai di daerah yang terkena pasang surut air laut dalam

bentuk kelompok perahu yang disebut kelompok pelayaran bersama. Jumlah penghuni *bidok* adalah 10-15 jiwa. Di mana siklus perjalanan dari darat ke laut dan sebaliknya, dijalani sepanjang waktu selama mereka masih tinggal di atas perahu. Lebih banyak waktu dihabiskan di laut sekitar gugusan karang mencari hasil laut, dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan di pantai. Hal ini bisa terjadi karena tujuan mereka mendarat di tepi pantai adalah menukarkan hasil laut yang mereka peroleh dengan bahan makanan, pakaian, peralatan kerja, dan mengambil air tawar.

Kampoh Suku Bajo di Bajoe tidak mengikuti jalur jalan utama tetapi tersebar dan mengelompok pada pinggir pantai dan mereka mendirikan rumahnya sebagian besar menghadap ke laut. Bagi Suku Bajo di masa lalu, rumah-rumah menghadap ke laut sesuai falsafah hidup mereka, yaitu laut itu sumber kehidupan atau kehidupan mereka segala-galanya di sekitar lautan. Pada mulanya sebagian besar rumah orang Bajo terletak di atas air laut untuk memudahkan pencapaian ke laut lepas dengan menggunakan perahu. Saat ini, sebagian besar rumah mereka sudah berada di daratan. Perubahan lokasi ini mempengaruhi wujud rumah orang Bajo dilihat dari bentuk, luasan, dan strukturnya.

Pada Suku Bajo, perubahan sistem pengetahuan dan makna mempunyai implikasi yang lebih jauh pada permukimanannya. Implikasi tersebut adalah perubahan orientasi mereka terhadap laut dan darat. Pada saat tinggal di *Babaroh*, orientasi ke laut dan darat hanya sebagai tempat sementara. Kondisi ini berubah pada saat mereka tinggal di *papondok*, menjadi berorientasi juga ke darat. Lalu pada saat awal tinggal di *rumak*, orientasinya adalah laut dan darat, dan saat ini berubah menjadi orientasi yang lebih dominan di darat daripada laut. Perubahan orientasi tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.



Sumber: Salipu, 2000

Gambar 1. Perubahan Tapak Permukiman Suku Bajo



Sumber: Salipu, 2000

Gambar 2. Rumah Orang Bajo di Atas Daratan

Lokasi Permukiman Suku Bajo di Bajoe dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.



Gambar 3. Pantai Bajoe, September 2004

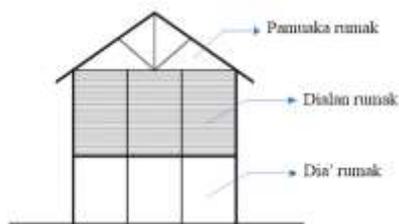


Gambar 4. Pantai Bajoe, Februari 2018

Rumah orang Bajo terdiri atas tiga bagian seperti halnya rumah orang Bugis yang terdiri atas:

1. *Pamuka rumah*, yaitu bagian atas rumah yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat penangkap ikan seperti jala, pukat dan panah ikan;
2. *Dialan rumah*, yaitu bagian tengah rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal;
3. *Dia' rumah*, yaitu bagian bawah yang digunakan sebagai tempat menambatkan perahu dan menyimpan layar.

Pembagian ruang secara vertikal pada rumah orang Bajo di Bajoe, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Salipu, 2000

Gambar 5. Potongan Rumah Bajo di Bajoe

Bentuk rumah Bajo ini menyerupai rumah orang Bugis yang ada di sekitar permukiman mereka.

Teori Permukiman

Definisi rumah menurut Newmark & Thomson (1977:2) dapat dilihat dari istilah *House* dan *Home* yang dijelaskan sebagai berikut: *home* didefinisikan sebagai tempat tinggal atau hunian yang merupakan tempat kediaman seseorang atau keluarga, sebuah lingkungan psikososial, sedangkan *house* didefinisikan sebagai bangunan tempat tinggal orang-orang, bersifat struktural, tempat berlindung (*shelter*), sebuah lingkungan fisik. Maka pengertian dari rumah (*house & home*) adalah sebuah tempat tinggal (fisik) seseorang atau keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari (sosial) dan sebagai tempat berlangsungnya proses pengembangan diri (budaya).

Permukiman merupakan tempat suatu komunitas berada, yang mana di dalamnya terjalin interaksi antar berbagai aspek. Menurut Barbara Ward (1976:125), aspek ini mencakup aspek sosial, prasarana fisik, dan budaya. Beberapa aspek sosial mencakup kesehatan, melek huruf, pekerjaan, keamanan penghuni. Aspek prasarana fisik dasar dalam

permukiman yakni air, saluran yang baik, udara bersih, akses dan mobilitas. Aspek budaya di antaranya mencakup kebebasan berekspresi dan memilih, adanya kesinambungan, bersifat responsif, mempengaruhi secara efektif, keindahan, seni, visi dan mimpi-mimpi.

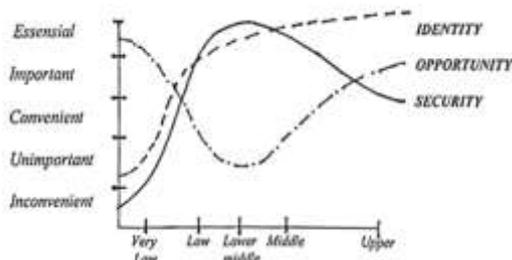
Uraian di atas menjelaskan bahwa permukiman terdiri dari aspek fisik dan non fisik yang perlu berinteraksi secara seimbang agar memberi nilai bagi sebuah rumah maupun permukiman. Menurut Rapoport (1969), rumah adalah suatu lembaga dan bukan hanya struktur, yang dibuat untuk berbagai tujuan yang kompleks dan karena membangun suatu rumah merupakan gejala budaya, maka bentuk dan pengaturannya sangat dipengaruhi oleh budaya lingkungan di mana bangunan itu berada. Uraian Rapoport tersebut menjelaskan bahwa apa yang dihasilkan manusia itu terbentuk karena latar belakang sosial budaya manusia.

Altman (1989) menjelaskan rumah sebagai refleksi dari hubungan antara kebudayaan dan lingkungan. Desain sebuah rumah akan mengindikasikan berbagai hal, yaitu: iklim dan faktor-faktor lingkungan, struktur keluarga dan sistem kekerabatan, agama, kosmologi serta pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Dari uraian Altman dapat disimpulkan bahwa peran kebudayaan dalam bentuk rumah akan tampak dari keterlibatan aspek budaya tersebut, yaitu: kosmologi, agama serta struktur keluarga dan struktur sosial. Sebaliknya, rumah akan merefleksikan berbagai aspek atau nilai-nilai dari kebudayaan. Menurut Roske (1983) dalam Swanendri (2000:II-32), orang akan memilih rumahnya yang merupakan perlindungan dasar dari lingkungannya (di luar kulit dan pakaian) untuk menampilkan atau menyimbolkan apa-apa yang menarik yang sebelumnya tidak dapat ditampilkan. Selain memenuhi kebutuhan sebagai *shelter*, rumah juga dapat memberikan kepuasan akan pemenuhan kebutuhan psikologis.

Perumahan menurut John F.C. Turner

Menurut Turner (1972:151), perumahan bukan kata benda tetapi kata kerja tentang proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial-ekonomi penghuni. Perubahan pola lokasi perumahan pada golongan tertentu merupakan konsepsi segregasi (pemisahan) tingkat sosial yang dapat diukur pada perubahan lokasi. Hal ini terutama dilakukan oleh penduduk yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi, yang memilih lokasi rumah berstandar modern dan memberikan identitas.

Prioritas kebutuhan pada tingkat pendapatan akan berbeda antara setiap kelompok, hal ini sesuai dengan penjelasan Turner (1972:165) bahwa prioritas kebutuhan vital pada tingkat pendapatan bervariasi dan mempunyai nilai-nilai esensial yang berlainan. Pada tingkat pendapatan sangat rendah, maka hal yang esensial akan berbeda jika berada pada tingkat pendapatan rendah, dan seterusnya. Gambaran lebih jelas tentang prioritas kebutuhan vital dan tingkat pendapatan ini dapat dilihat pada grafik berikut.

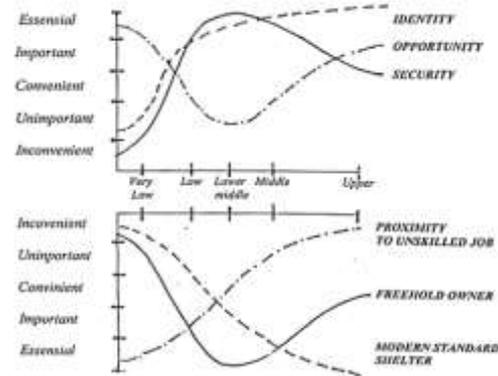


Sumber: Salipu, 2000

Gambar 6. Prioritas Kebutuhan Vital pada Tingkat Pendapatan

Gambar di atas merupakan ilustrasi dari konsep Turner yang menjelaskan jika ada perubahan pada tingkat pendapatan, maka akan menyebabkan perubahan pada prioritas kebutuhan vital. Konsep ini disusun setelah Turner melakukan penelitian di Lima (Peru). Hipotesis dari Turner adalah bahwa sektor pendapatan yang sangat rendah sangat memprioritaskan *opportunities* (kesempatan) untuk keluar dari situasinya sedangkan pada pendapatan rendah dan sedang, maka hal yang sangat penting bagi mereka adalah *security* (keamanan) dari tempat kerjanya. Sebaliknya, pada tingkat pendapatan tinggi yang mereka pertingkatkan adalah sesuatu yang memberikan *identity* (identitas) dari tingkat sosialnya.

Matched prioritas antara kebutuhan vital dan perumahan dengan tingkat pendapatan tergambar pada grafik berikut ini.



Sumber: Salipu, 2000

Gambar 7. Kesesuaian antara Prioritas Kebutuhan Vital dan Perumahan dengan Tingkat Pendapatan

Gambar di atas menjelaskan beberapa hal penting tentang kebutuhan vital dan kebutuhan perumahan terkait dengan tingkat pendapatan yang dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang pendapatannya sangat rendah, cenderung menganggap kesempatan dan memperoleh tempat tinggal dekat dengan lokasi pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan merupakan hal yang esensial;
2. Bagi yang memiliki pendapatan rendah sampai menengah-rendah, yang esensial adalah kepemilikan dan keamanan;
3. Bagi yang memiliki pendapatan tinggi, hal yang esensial adalah memiliki rumah yang berstandar modern dan memberikan identitas.

Ini berarti pemilihan lokasi perumahan bagi masing-masing kelompok tidak selalu sama. Kecenderungan masing-masing kelompok pendapatan akan sangat berbeda sesuai dengan nilai esensial yang dimiliki. Apakah hal ini juga berlaku pada permukiman Suku Bajo, yang secara fisik tetap berada dalam kelompok mereka sendiri sehingga pemisahan etnis tidak terjadi, akan dikaji di sini. Teori Turner atau teori prioritas kebutuhan vital dan kebutuhan rumah dikaitkan dengan tingkat pendapatan, akan dijadikan acuan dalam upaya menjelaskan permukiman Suku Bajo sebagai kata kerja.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan aplikasi teori Turner tentang kebutuhan perumahan terkait dengan tingkat pendapatan dalam suatu permukiman. Pengumpulan data dilakukan antara lain lewat studi pustaka. Data sekunder diperoleh dengan menggali data pustaka dan sumber sekunder untuk menemukan data dan kerangka pemikiran dalam analisis. Survei dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Analisis yang dilakukan meliputi kegiatan penelaahan, pengelompokan dan penafsiran data yang bersumber dari kajian pustaka dengan menelaah artikel jurnal dan kepustakaan hasil penelitian sedangkan pengamatan lapangan dilakukan pada tahun 2018 yang berkaitan dengan kondisi kawasan permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

IV. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di permukiman Suku Bajo di Dusun Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang terletak 6 km di sebelah timur Kota Watampone ibukota Kabupaten Bone. Jarak antara Watampone dengan Kota Makassar adalah ±174 km.

V. PEMBAHASAN

Prioritas kebutuhan vital dan perumahan yang disandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat Suku Bajo, akan memperlihatkan bahwa berbagai tingkat pendapatan suatu kelompok masyarakat memiliki preferensi yang berbeda-beda akan sesuatu hal yang esensial dalam hidupnya. Makin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan mengalami perubahan yang kadang naik atau turun tingkat esensialnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Turner (1972) bahwa perumahan bukan kata benda tetapi kata kerja tentang proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuni walaupun kata perumahan dalam bahasa Inggris dapat berarti kata benda (*noun*) dan kata kerja (*verb*). Kalau perumahan dianggap sebagai kata kerja, maka pergerakan pun menjadi hal yang mendasar dalam aktivitas. Jika dilihat dari bidang perumahan, maka prioritas kebutuhan terhadap perumahan bagi masyarakat yang berada pada level sangat rendah adalah dekat dengan tempat kerja. Jika level pendapatan berubah menjadi menengah-rendah, maka prioritas kebutuhan

juga akan berubah menjadi kepemilikan, baik status tanah maupun rumah.

Teori Turner tersebut sebenarnya menjelaskan transformasi morfologi prioritas, baik kebutuhan vital maupun kebutuhan perumahan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Transformasi Prioritas Kebutuhan Rumah Menurut Tingkat Pendapatan

Level Income	Prioritas Kebutuhan	
	Vital	Perumahan
1. Sangat Rendah	Kesempatan	Dekat dengan tempat kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus.
2. Rendah	Keamanan	Kepemilikan pribadi
3. Menengah Rendah	Keamanan	Kepemilikan pribadi
4. Menengah	Identitas	Tempat tinggal modern
5. Tinggi	Identitas	Tempat tinggal modern

Perubahan pada level pendapatan tersebut hanya dapat dicapai dengan meningkatkan usaha, baik produksi, pengolahan dan pemasaran. Kegiatan ekonomi tersebut memerlukan penyesuaian dengan kondisi pasar dan sumber daya sehingga diperlukan usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan usaha dengan tetap memperhatikan sumber daya yang ada.

Kondisi sosial ekonomi Suku Bajo yang tinggal di kawasan pesisir sebagai nelayan sesuai keahlian dan pola hidup bahari menyebabkan keterbatasan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah strategi untuk bertahan hidup masyarakat Suku Bajo yang dilakukan dengan cara relasi aktif dan relasi pasif. Hal ini dijelaskan oleh Mukramin (2018:183) dalam penelitiannya terhadap Suku Bajo di Kolaka Utara, bahwa relasi aktif, yaitu hubungan proses sosial yang bersifat horisontal (hubungan terhadap sesama masyarakat), dengan cara bertahan pada mata pencaharian sebagai nelayan dalam upaya mempertahankan hidup sedangkan relasi pasif adalah hubungan proses sosial yang bersifat vertikal (hubungan terhadap pemerintah). Dengan kondisi yang terbatas, baik pada aspek pendidikan, ekonomi, bahkan sosial, akan diperlukan dukungan dari pemerintah setempat. Kondisi sosial ekonomi Suku Bajo yang rendah, tidak hanya terjadi di Kolaka Utara saja, tetapi juga terjadi di Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone.

Kondisi sosial ekonomi Suku Bajo yang rendah, dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah sampai rendah namun tidak dapat diklasifikasikan

seperti yang terdapat dalam Teori Turner, karena prioritas kebutuhan mereka berbeda. Bagi Suku Bajo yang hidupnya terbiasa di laut, maka permukiman yang dekat dengan tempat pekerjaan adalah hal yang paling esensial dalam hidup mereka. Walaupun kondisi sosial mereka berubah dari sangat rendah ke rendah-menengah, prioritas kebutuhan perumahan tetap memilih lokasi perumahan yang dekat dengan tempat kerja (laut dan perahu).

Kondisi sejarah masa lalu Suku Bajo sebagai manusia bahari dan lokasi permukiman mereka yang tersebar di beberapa kawasan pesisir pantai Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan kawasan Asia Tenggara, tidak bisa dipisahkan dari kawasan pantai dan lautan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hasrawaty dkk (2017:33), bagi masyarakat Suku Bajo yang tersebar di Kabupaten Wakatobi, laut bagi mereka adalah berkah alam sebagai modal untuk kepentingan sosial.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka perubahan prioritas tersebut pada Teori Turner, hanya dilihat dari segi kebutuhan yang umum bagi golongan yang tinggal di daerah perkotaan, di mana tanah bagi golongan berpenghasilan rendah sulit didapat dengan harga yang rendah sedangkan pada kasus Suku Bajo, masyarakatnya berada pada daerah kota (dalam pengertian administratif), tetapi kehidupan warganya masih diwarnai dengan suasana desa. Prioritas untuk mendapatkan rumah modern sebenarnya lebih merupakan usaha untuk mendapatkan rumah yang luas agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

Pembuatan rumah "modern" dalam uraian Turner lebih tepat disebut sebagai usaha untuk mengatasi kondisi alam (air laut, angin, tapak dan iklim) sebagaimana yang dijelaskan Juhana (2000) dalam Nurmaningtyas (2012:34), faktor fisik seperti karakteristik wilayah pesisir ini dibentuk oleh parameter lingkungan fisik seperti pasang surut, arus laut, gelombang, angin, salinitas, suhu dan perubahan muka air laut. Kondisi lingkungan kawasan pesisir yang demikian itu menyebabkan adanya kesulitan bagi penghuni untuk menikmati ketenangan lingkungan karena adanya perubahan lingkungan yang terjadi setiap saat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan dalam permukiman Suku Bajo, diperlukan upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang terus berubah. Di samping itu, modern dalam pengertian

mereka adalah membuat bentukan yang menyerupai bangunan lain di sekitarnya, yaitu membuat rumah yang serupa dengan rumah orang Bugis yang ada disekitar mereka.

Dengan kondisi yang diuraikan di atas, maka apabila Teori Turner akan digunakan untuk menjelaskan perubahan prioritas kebutuhan perumahan Suku Bajo, perlu ada penyesuaian *level income* dan prioritas kebutuhan yang perlu dikoreksi karena bentuk kebutuhan Suku Bajo tersebut tidak sama dengan kriteria yang diungkapkan dalam Teori Turner. Dengan kata lain bisa saja muncul prioritas kebutuhan baik vital maupun perumahan yang lebih sesuai dengan sistem pengetahuan dan makna dari kebudayaan tersebut.

Teori permukiman Turner lebih banyak menguraikan perubahan pada prioritas kebutuhan vital dan perumahan pada *level income* tertentu dengan memberikan tiga kategori perubahan sedangkan kategori tingkat pendapatan pada kajian ini dibagi menjadi lima. Turner berpendapat bahwa antara level pendapatan rendah dan menengah-rendah terdapat kesamaan prioritas kebutuhan, demikian pula pada level pendapatan menengah dan tinggi, ada kesesuaian prioritas kebutuhan. Menurut pendapat penulis, kategori prioritas Turner lebih cocok diterapkan pada konteks perkotaan padat, di mana tanah merupakan sumber daya alam yang langka dengan tipe perumahan yang sesuai standar modern dan kepemilikan yang dibangun oleh swasta, serta kondisi masyarakat yang memiliki bidang pekerjaan yang bervariasi.

VI. KESIMPULAN

1. Prioritas kebutuhan vital dan perumahan, walaupun dapat menjelaskan kondisi permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe tentang pemilihan lokasi yang dekat dengan tempat kerja bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah, namun masyarakat yang telah memiliki pendapatan menengah dan tinggi (para pemilik usaha), lokasi rumah mereka tetap berada di tempat awal yang dekat dengan tempat pekerjaan.
2. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah-rendah, dapat dijelaskan bahwa mereka memprioritaskan kepemilikan lahan dan rumah, dengan adanya perubahan rumah mereka yang dulunya di atas laut (tidak ada kepemilikan pribadi), saat ini mereka telah menghuni rumah secara permanen di darat maupun

- di atas air (kepemilikan pribadi dan jaminan keamanan).
3. Kelompok yang berpenghasilan menengah dan tinggi di permukiman Suku Bajo, tidak meninggalkan lokasi permukiman mereka, sebagaimana terjadi pada suku Bugis yang cenderung memilih lokasi rumah yang modern dengan fasilitas yang memenuhi aspek bangunan modern dari segi sarana dan prasarana. Namun bagi Suku Bajo, keterikatan dalam kelompok mereka sangat kuat, termasuk bahasa yang dipergunakan oleh Suku Bajo yang jarang dimengerti oleh masyarakat yang ada disekitarnya (Bugis), hal ini berbeda dengan Suku Bajo yang juga dapat berbahasa Bugis. Mereka telah merasa menyatu dengan lingkungan permukiman mereka saat ini.
 4. Teori Turner tentang prioritas kebutuhan vital dan perumahan terkait dengan *level income*, lebih sesuai untuk menjelaskan fenomena perubahan kebutuhan tersebut pada wilayah kota, di mana harga tanah sangat mahal dan lokasi pekerjaan pada masing-masing kelompok berbeda-beda, sedangkan untuk lokasi penelitian ini lebih menyerupai desa yang secara administratif termasuk wilayah kota (kelurahan).

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin and Chemer, Martins (1989). *Culture and Environment*. New York, Cambridge University Press, 1984 reprinted 1989
- Hasrawaty, Esti, Anas, Pigoselpi, Wisudo, Sugeng, Hari (2017). Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 11 (1): 25-34.
- Mattulada (1995). *LATO: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Cet.2*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mukramin, Sam'un (2018). Strategi Bertahan Hidup: Masyarakat Pesisir Suku Bajo di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Walasuji*, 9 (1), Juni 2018: 175-185. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.
- Nemwark, Norma L. & Thomson, Patricia J. (1977). *Self, Space and Shelter An Introduction to Housing*. San Fransisco: Canfield Press.
- Nurmaningtyas, Anggia R. (2012). Teknologi Perlindungan Rumah Kayu Pada Arsitektur Rumah Kayu Suku Tobati di Teluk Yotefa, Papua. *Tesis Program Studi Teknik Arsitektur*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rapoport, Amos (1969). *House Form and Culture*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Salipu, Amir (2000). Transformasi Perumahan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kota Administratif Watampone, Sulawesi Selatan. *Tesis Program Studi Arsitektur*, Program Pasca Sarjana ITS Surabaya.
- Soesangobeng, Herman (1977). *Perkampungan Bajo di BajoE Suatu Rintisan Studi Tentang Orang Bajo dan Konsep Permukimannya di Pesisir Teluk Bone dan Sekitarnya*. Penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Ujung Pandang.
- Swanendri, Ni Made (2000). Eksistensi Rumah Bali sebagai Basis Ekonomi Keluarga; Studi Kasus Desa Belega dan Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali. *Tesis Program Studi Arsitektur*. Program Pasca Sarjana ITS Surabaya.
- Turner, John, FC (1972). *Freedom to Build*. New York: The Macmillan Company.
- Ward, Barbara (1976). *The Home of Man*. Pinguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England.